PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2023

Jl. **Gatot Subroto No. 10**

Mpunda – Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156

e-mail : **info@pa-bima.go.id www.pa-bima.go.id**

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. **Gatot Subroto No. 10**

Mpunda – Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156

e-mail : **info@pa-bima.go.id website : www.pa-bima.go.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bima adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 6 Juli 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H u s n i n a s, S.Ag.
NIP 196903132003121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel dan Lampiran iv
Pernyataan Tanggung Jawab 1
Ringkasan 2
I. Laporan Realisasi Anggaran 6
II. Neraca 7
III. Laporan Operasional 9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 11
V. Catatan atas Laporan Keuangan 12
A. Penjelasan Umum 12
A.1. Dasar Hukum 12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima ..... **Error! Bookmark not defined.**13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 15
A.4. Basis Akuntansi 16
A.5. Dasar Pengukuran 16
A.6. Kebijakan Akuntansi 17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 25
B.2. Belanja 26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 29
C.1. Aset Lancar 29
C.2. Aset Tetap 31
C.3. Aset Lainnya 35
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 36
C.6. Ekuitas 38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 38
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 38
D.2. Beban Pegawai 38

D.3. Beban Persediaan 39
D.4. Beban Barang dan Jasa 40
D.5. Beban Pemeliharaan 40
D.6. Beban Perjalanan Dinas 41
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 41
D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 42
D.9. Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi 42
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 43
D.11. Beban Beban Lain-lain 43
D.12. Kegiatan Non Operasional 44
D.13. Pos Luar Biasa 44
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 44
E.1. Ekuitas Awal 44
E.2. Surplus (defisit) LO 45
E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan 45
E.4. Koreksi Nilai Persediaan 45
E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 45
E.6. Transaksi Antar Entitas 46
E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas 46
E.8. Ekuitas Akhir 46
F. Pengungkapan Penting Lainnya 46
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 46
F.2. Pengungkapan Lain-lain 46
Laporan-laporan Pendukung 50
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 51
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 54

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 3
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang 19
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat 21
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 23
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 25
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 2022 25
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 26
Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022 26
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 27
Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 28
Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 29
Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 29
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30
Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 30
Tabel 17 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan 2022 31
Tabel 18 Rincian Aset Tetap 31
Tabel 19 Rincian Saldo Tanah 32
Tabel 20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 35
Tabel 21 Rincian Aset Lainnya 35
Tabel 22 Rincian Aset tak Berwujud 36
Tabel 23 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022 36
Tabel 24 Rincian Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 38
Tabel 25 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 38
Tabel 26 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 39
Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 40
Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 40
Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 41
Tabel 30 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 41
Tabel 31 Rincian Beban Bantuan Sosial 42
Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 42
Tabel 33 Rincian Beban Piutang tak Tertagih 43
Tabel 34 Rincian Beban Lain-lain 43
Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional 44
Tabel 36 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 44
Tabel 37 Rincian Koreksi Nilai Persediaan 45

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGADILAN AGAMA BIMA

Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156 e-mail : info@pa-bima.go.id web: pa-bima.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 6 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Husninas, S.Ag.

NIP.196903132003121002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,217,175.

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima pada TA 2023 adalah sebesar Rp3,979,656,446 atau mencapai 59.91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 6,642,563,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran/Estimasi	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2,163,000	1,217,175	56.27	1,622,724
Belanja Negara	6,642,563,000	3,979,656,446	59.91	3,520,543,831

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2023 dan 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp7,313,918,441 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp19,325,000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp7,294,593,441; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp406,729,394 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp406,729,394 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp6,907,189,047; Jumlah Kewajiban dan ekuitas sebesar Rp6,907,189,047;

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2023	TA 2022	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	19,325,000	887,250	18,437,750	2,078.08
Aset Tetap	7,294,593,441	7,423,095,545	(128,502,104)	(1.73)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	7,313,918,441	7,423,982,795	(110,064,354)	(1.48)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	406,729,394	21,366,978	385,362,416	1,803.54
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	406,729,394	21,366,978	385,362,416	1,803.54
Ekuitas				
Ekuitas	6,907,189,047	7,402,615,817	(495,426,770)	(6.69)
Jumlah Ekuitas	6,907,189,047	7,402,615,817	(495,426,770)	(6.69)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7,313,918,441	7,423,982,795	(110,064,354)	(1.48)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1,217,043, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4,500,274,716, sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(4,499,057,673).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp(9,545,868) dan surplus (defisit) sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar Rp(4,508,603,541).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp7,402,615,817, dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp(4,508,603,541) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4,013,176,771, dengan kenaikan ekuitas sebesar Rp(495,426,770) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp6,907,189,047.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	***Pendapatan Negara dan Hibah***	***B.1***				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2,163,000	1,217,175	56.27	1,622,724
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2,163,000	1,217,175	56.27	1,622,724
B.	***Belanja Negara***	***B.2***				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5,440,784,000	3,237,135,471	59.50	2,575,889,877
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,201,779,000	742,520,975	61.79	760,653,954
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	184,000,000
	Jumlah Belanja Negara		6,642,563,000	3,979,656,446	59.91	3,520,543,831

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BIMA

NERACA

PER 30 JUNI 2023 DAN 2022

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2023	TA 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	15,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	62,000	0
Persediaan	C.1. 3.	4,263,000	887,250
Jumlah Aset Lancar		19,325,000	887,250
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	3,538,955,000	3,538,955,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3,279,390,125	3,239,690,125
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	3,901,639,000	3,912,604,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	145,904,200	145,904,200
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	5,348,929	5,348,929
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(3,576,643,813)	(3,419,406,709)
Jumlah Aset Tetap		7,294,593,441	7,423,095,545
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	12,100,000	12,100,000
Aset lainnya yang belum diregister	C.3. 2.	0	0
Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya	C.3. 3.	(12.100.000)	(12.100.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		7,313,918,441	7,423,982,795
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada pihak ketiga	C.4. 1.	386,226,394	21,366,978
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	5,441,000	0
Uang Muka Dari KPPN	C.4. 3.	15,000,000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4 4.	62,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		406,729,394	21,366,978
Jumlah Kewajiban		406,729,394	21,366,978
EKUITAS			
Ekuitas	C.5		
Ekuitas	C.5. 1.	6,907,189,047	7,402,615,817
Jumlah Ekuitas		6,907,189,047	7,402,615,817

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**7,313,918,441**	**7,423,982,795**

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2023	TA 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D. 1	1,217,043	1,893,178
Jumlah Pendapatan		1,217,043	1,893,178
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D. 2	3,574,117,837	3,162,715,302
Beban Persediaan	D. 3	15,222,250	10,975,000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	431,613,850	429,084,661
Beban Pemeliharaan	D. 5	230,796,475	279,788,840
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	94,830,700	68,411,200
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	153,693,604	143,773,594
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4,500,274,716	4,094,748,597
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4,499,057,673)	(4,092,855,419)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(defisit) pelepasan aset non Lancar		(9,546,000)	0
Surplus/(defisit) penyelesaian kewajiban Jangka panjang		0	0
Surplus/(defisit) dari kegiatan non Operasional lainnya		132	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(9,545,868)	0
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/(defisit) dari pos luar Biasa		0	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		**(4,508,603,541)**	**(4,092,855,419)**

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2023	TA 2022
Ekuitas Awal	E. 1	7,402,615,817	7,215,281,629
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4,508,603,541)	(4,092,855,419)
Koreksi Yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Lain-lain			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	4,013,176,771	3,518,921,107
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(495,426,770)	(573,934,312)
Ekuitas Akhir		6,907,189,047	6,641,347,317

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

q. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

r. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

s. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima

Visi Pengadilan Agama Bima adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Misi Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Bidang Perkara**

   Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara, peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara, peningkatan kualitas putusan/penetapan, peningkatan mutu penyelesaian perkara, penyediaan layanan informasi mengenai jalannya tahapan-tahapan persidangan dengan pemanfaatan tekhnologi informasi sehingga bisa diakses secara umum demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam bidang pelayanan penyelesaian perkara dengan mengembangkan sistem SIPP.

2. **Bidang Pengawasan Internal**

   Meningkatkan mutu pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim dan pejabat kepaniteraan baik yang bersifat rutin maupun insidentil, meningkatkan mutu pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai dan pejabat sekretariat baik yang bersifat rutin maupun insidentil.

3. **Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian**

   Meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan seluruh pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian cuti, dan laporan kepegawaian.

4. **Bidang Pengelolaan Keuangan**

Meningkatkan mutu perencanaan dan realisaasi dalam bidang Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tetap berpegang kepada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

5. **Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

   Meningkatkan mutu administrasi tata persuratan, meningkatkan mutu pengelolaan barang-barang inventaris kantor serta administrasi dan pemeliharaan, meningkatkan mutu kebersihan dan keamanan kantor, meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bima.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI *online* dan SAKTI *offline*, yang menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audited.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.

2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Bima menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek

    Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

    Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  - Kewajiban Jangka Panjang

    Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp1,217,175

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1,217,175. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	**2,163,000**	**1,217,043**	**56.27**
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	**0**	**132**	**0**
Total Pendapatan	**2,163,000**	**1,217,175**	**56.27**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mendapatkan pendapatan sebesar Rp1,217,175, mengalami penurunan sebesar Rp(405,549) atau (24.99)% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas penyewaan rumah dinas yang digunakan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima sejak Januari 2023 hingga Juni 2023.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1,217,043	1,622,724	(405,681)	25.00

2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	132	0	132	0
	Total Pendapatan	1,217,175	1,622,724	(405,549)	24.99

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 3,979,656,446

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp3,979,656,446 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 59.91% dari anggaran senilai Rp6,642,563,000 dengan sisa anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,662,906,554. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5,440,784,000	3,237,135,527	59.50
Belanja Barang	1,201,779,000	742,520,975	61.79
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	6,642,563,000	3,979,656,502	59.91
Pengembalian Belanja	0	56	0
Total Belanja Netto	6,642,563,000	3,979,656,446	59.91

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

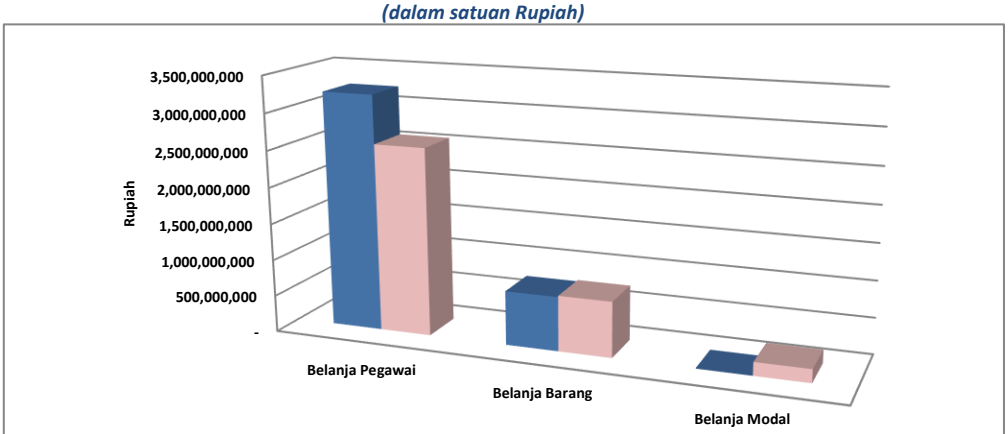

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
2023	3,237,135,471	742,520,975	-
2022	2,575,889,877	760,653,954	184,000,000

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2023 & 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp459,112,615 atau sebesar 13.04% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :

1. Naiknya realisasi belanja pegawai sebesar Rp661,245,594 yang disebabkan oleh:
   - Bertambahnya jumlah hakim dan pegawai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Bima karena ada mutasi dan promosi di lingkungan Ditjend Badilag.
2. Tidak ada pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	3,237,135,471	2,575,889,877	661,245,594	25.67
Belanja Barang	742,520,975	760,653,954	(18,132,979)	(2.38)
Belanja Modal	0	184,000,000	(184,000,000)	(100.00)
Total Belanja	3,979,656,446	3,520,543,831	459,112,615	13.04

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp. 3,237,135,471

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp3,237,135,471 dan Rp2,575,889,877.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp459,112,615 atau sebesar 13,04% dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Bertambahnya jumlah hakim dan pegawai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Bima karena ada mutasi dan promosi di lingkungan Ditjend Badilag.

Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,550,913,400	1,289,066,520	261,846,880	20.31
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,951	17,309	2,642	15.26
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	113,239,980	99,396,260	13,843,720	13.93
Belanja Tunj. Anak PNS	33,803,690	31,289,980	2,513,710	8.03
Belanja Tunj. Struktural PNS	23,040,000	18,200,000	4,840,000	26.59
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,017,145,000	685,615,000	331,530,000	48.36
Belanja Tunj. PPh PNS	169,712,566	88,629,460	81,083,106	91.49
Belanja Tunj. Beras PNS	80,168,940	70,971,600	9,197,340	12.96
Belanja Uang Makan PNS	185,757,000	235,949,000	(50,192,000)	(21.27)

Beban Tunjangan Umum PNS	13,385,000	10,855,000	2,530,000	23.31
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	49,950,000	45,900,000	4,050,000	8.82
Total Belanja Brutto	3,237,135,527	2,575,890,129	661,245,398	25.67
Pengembalian Belanja	(56)	(252)	196	(350.00)
Total Belanja Netto	3,237,135,471	2,575,889,877	661,245,594	25.67

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 742,520,975

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp742,520,975 dan Rp760,653,954.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(18,132,979) atau sebesar (2.38)% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan karena naiknya realisasi Belanja Barang Operasional dan Belanja Pemeliharaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	358,870,250	340,130,935	18,739,315	5.51
Belanja Barang Persediaan	18,598,000	13,000,000	5,598,000	43.06
Belanja Barang Non Operasional	6,728,400	0	6,728,400	0
Belanja Jasa	34,211,150	63,806,479	(29,595,329)	(46.38)
Belanja Pemeliharaan	229,282,475	276,145,340	(46,862,865)	(16.97)
Belanja Perjalanan Dinas	94,830,700	67,571,200	27,259,500	40.34
Total Belanja Brutto	742,520,975	760,653,954	(18,132,979)	(2.38)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	742,520,975	760,653,954	(18,132,979)	(2.38)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp184,000,000.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(184,000,000) atau sebesar (100)% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat anggaran anggaran Belanja Modal.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	184,000,000	(184,000,000)	(100.00)
Belanja Penambahan nilai Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	184,000,000	(184,000,000)	(100.00)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	184,000,000	(184,000,000)	(100.00)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp. 19,325,000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19,325,000 dan Rp887,250.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2023 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	62,000	0
Persediaan	4,263,000	887,250
Total Aset Lancar	19,325,000	887,250

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 15,000,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp15,000,000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2023	TA 2022
1.	Uang Tunai di brankas	9,559,000	0
2.	Kwitansi UP	5,441,000	0
	Jumlah	15,000,000	0

Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 sebesar Rp15,000,000.

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas: Rp.62,000

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp62,000 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 berasal dari setoran pajak yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca.

Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2023	TA 2022
1.	Kas Lainnya dan Setara Kas	62,000	0
	Jumlah	62,000	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp. 4,263,000.

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4,263,000 dan Rp887,250. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Barang Konsumsi	4,263,000	887,250
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
	Total	4,263,000	887,250

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan senilai Rp4,263,000 berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik nomor: W22-A4/855.A/PL.03/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 7,294,593,441

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp7,294,593,441 dan Rp7,423,095,545 dengan penurunan sebesar Rp(128,502,104) atau sebesar (1.73)%. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan
1	Tanah	3,538,955,000	3,538,955,000	0
2	Peralatan dan Mesin	3,279,390,125	3,239,690,125	39,700,000
3	Gedung dan Bangunan	3,901,639,000	3,912,604,000	(10,965,000)
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	145,904,200	145,904,200	0
5	Aset Tetap Lainnya	5,348,929	5,348,929	0
	Jumlah	10,871,237,254	10,842,502,254	28,735,000
	Akumulasi Penyusutan	(3,576,643,813)	(3,419,406,709)	(157,237,104)
	Nilai Buku Aset Tetap	7,294,593,441	7,423,095,545	(128,502,104)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 3.538.955.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.538.955.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.268 M^2	HAK PAKAI 01 / BG 661984	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	2.565.027.000
2.	1	920 M^2	HAK PAKAI 01 / BG 661983	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	391.168.000
Jumlah						3.538.955.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah tidak mengalami perubahan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023. Tidak ada penambahan aset tanah baru bagi Kantor Pengadilan Agama Bima. Seperti yang telah tertera di tabel, rincian tanah sebagai berikut:

1. Tanah untuk Bangunan Kantor dengan luas 1.268 M2 No. sertifikat HAK PAKAI 01 / BG 661984 Atas Nama Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI peruntukan Pengadilan Agama Bima senilai Rp2.565.027.000
2. Tanah untuk Rumah Dinas dengan luas 920 M2 No. sertifikat HAK PAKAI 01/ BG 661983 Atas Nama Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI peruntukan Pengadilan Agama Bima senilai 391.168.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 3,279,390,125

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3,279,390,125 dan Rp3,239,690,125. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	**3,239,690,125**
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk Peralatan dan Mesin	**39,700,000**
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	**0**
Saldo per 30 Juni 2023	**3,279,390,125**

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(2,806,747,425)
Nilai Buku 30 Juni 2023	472,642,700

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp39,700,000 karena adanya transfer masuk peralatan dan mesin berupa :

- 2 (dua) buah scanner senilai Rp39,700,000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 3,901,639,000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3,901,639,000 dan Rp3,912,604,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	3,912,604,000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Penghapusan Pos Jaga	(10,965,000)
Saldo per 30 Juni 2023	3,901,639,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(722,834,589)
Nilai Buku 30 Juni 2023	3,178,804,411

Terdapat perubahan nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 karena adanya penghapusan pos jaga. Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp**3,901,639,000**.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 145,904,200

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp145,904,200 dan Rp145,904,200.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	145,904,200

Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2023	145,904,200
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(47,061,799)
Nilai Buku 30 Juni 2023	98,842,401

Saldo tersebut merupakan saldo untuk jaringan kantor Pengadilan Agama Bima. Saldo tersebut tetap atau tidak berubah per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 karena tidak ada penambahan jaringan untuk Kantor Pengadilan Agama Bima sampai tanggal 30 Juni 2023.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 5,348,929

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5,348,929 dan Rp5,348,929.

Nilai perolehan Aset tetap Lainnya tidak mengalami perubahan per 30 Juni 2023 dan 2022. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	5,348,929
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2023	5,348,929
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku 30 Juni 2023	5,348,929

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. (3,576,643,813)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(3,576,643,813) dan Rp(3,419,406,709).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3,279,390,125	(2,806,747,425)	472,642,700
2	Gedung dan Bangunan	3,901,639,000	(722,834,589)	3,178,804,411
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	145.904.200	(47,061,799)	98,842,401
4	Aset Tetap Lainnya	5,348,929	0	5,348,929
	Jumlah	7,332,282,254	(3,576,643,813)	3,755,638,441

Aset Lainnya: Rp. 0

C.3.Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 21 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	12.100.000	12.100.000
2	Aset Lainnya belum diregister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	12.100.000	12.100.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.100.000)	(12.100.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1 Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp. 12.100.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.100.000 dan Rp12.100.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	***Software* IT Kantor Pengadilan Agama Bima**	**12.100.000**
	Jumlah Total	**12.100.000**

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bima berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor Pengadilan Agama Bima. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2023.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 406,729,394

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp406,729,394 dan Rp21,366,978. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang di harapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan berupa Utang kepada pihak ketiga.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 23 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	**386,226,394**	**21,366,978**
Utang Yang Belum Ditagihkan	**5,441,000**	**0**
Uang Muka dari KPPN	**15,000,000**	**0**
Utang Jangka Pendek Lainnya	**62,000**	**0**
Jumlah	**406,729,394**	**21,366,978**

- Utang kepada pihak ketiga senilai Rp386,226,394,- berupa :
  1. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2023 BRI senilai Rp. 234,632,844,-
  2. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2023 BSI senilai Rp. 123,480,550,-
  3. Belanja Barang berupa Penghasilan PPNPN Induk bulan Juni 2023 senilai Rp.28,113,000,-
- Utang yang belum ditagihkan senilai Rp5,441,000,- merupakan Kwitansi UP belum di SPJ-kan per 30 Juni 2023.
- Uang muka dari KPPN senilai Rp15,000,000,- merupakan saldo UP yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal neraca.
- Utang jangka pendek lainnya senilai Rp62,000,- merupakan setoran pajak bulan Juni 2023 yang disetor ke kas negara pada bulan Juli 2023.

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga: Rp. 386,226,394

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp386,226,394 dan Rp0. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan: Rp. 5,441,000

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5,441,000 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kwitansi uang persediaan (UP) belum di SPJ-kan per 30 Juni 2023.

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 15,000,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp15,000,000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya: Rp. 62,000

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp62,000 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

C.6. Ekuitas

Ekuitas: Rp. 6,907,189,047

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,907,189,047 dan Rp7,402,615,817. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBP : Rp. 1,217,043

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1,217,043 dan Rp1,893,178. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 24 Rincian Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1,217,043	1,893,178	(35.71)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Total Pendapatan	1,217,043	1,893,178	(35.71)

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 3,574,117,837

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,574,117,837 dan Rp3,162,715,302. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 25 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,740,392,600	1,667,328,760	73,063,840	4.38
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(56)	0	(56)	0.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	22,189	22,107	82	0.37
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	126,646,890	128,103,780	(1,456,890)	(1.14)
Beban Tunj. Anak PNS	37,756,720	40,116,242	(2,359,522)	(5.88)
Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	23,400,000	2,520,000	10.77
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,132,070,000	866,305,000	265,765,000	30.68
Beban Tunj. PPh PNS	182,879,274	120,072,953	62,806,321	52.31
Beban Tunj. Beras PNS	89,873,220	91,466,460	(1,593,240)	(1.74)
Beban Uang Makan PNS	165,472,000	158,355,000	7,117,000	4.49
Beban Tunjangan Umum PNS	15,035,000	14,895,000	140,000	0.94
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	58,050,000	52,650,000	5,400,000	10.26
Total Beban Pegawai	3,574,117,837	3,162,715,302	411,402,535	13.01

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 15,222,250

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15,222,250 dan Rp10,975,000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	15,222,250	10,975,000	4,247,250	38.70
Total Beban Persediaan	15,222,250	10,975,000	4,247,250	38.70

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 431,613,850

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp431,613,850 dan Rp429,084,661. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	345,728,600	327,999,000	17,729,600	5.41
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	3,350,650	2,600,000	750,650	28.87
Beban Honor Operasional Satker	31,835,000	19,750,000	12,085,000	61.19
Beban Barang Operasional lainnya	9,996,000	21,419,235	(11,423,235)	(53.33)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,728,400	0	6,728,400	0
Beban Langganan Listrik	0	29,146,811	(29,146,811)	(100.00)
Beban Langganan Telepon	1,327,100	914,950	412,150	45.05
Beban Sewa	32,648,100	27,254,665	5,393,435	19.79
Total Beban Barang dan Jasa	431,613,850	429,084,661	2,529,189	0.59

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 230,796,475

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp230,796,475 dan Rp279,788,840. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114,058,500	150,295,000	(36,236,500)	(24.11)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	20,723,500	20,776,800	(53,300)	(0.26)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96,014,475	108,717,040	(12,702,565)	(11.68)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	230,796,475	279,788,840	(48,992,365)	(17.51)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 94,830,700

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp94,830,700 dan Rp68,411,200. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	94,830,700	68,411,200	26,419,500	38.62
Total Beban Perjalanan Dinas	94,830,700	68,411,200	26,419,500	38.62

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2023	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-

D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	*TA 2023*	*TA 2022*	*Naik(Turun)*	*%*
-	-	-	-	-
Total Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-

D.9. Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 153,693,604

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp153,693,604 dan Rp143,773,594. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	**104,876,748**	**97,294,245**	**7,582,503**	**7.79**
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**46,404,072**	**44,066,565**	**2,337,507**	**5.30**
Beban Penyusutan Jaringan	**2,412,784**	**2,412,784**	**0**	**0**
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	**0**	**0**	**0**	**0**

Jumlah Penyusutan	**153,693,604**	**143,773,594**	**9,920,010**	**6.90**
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	**0**	**0**	**0**	**0**
Beban Penyusutan Aset lain-lain	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Amortisasi	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	**153,693,604**	**143,773,594**	**9,920,010**	**6.90**

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	**0**	**0**	**0**	**0**

D.11. Beban Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Lain-lain	**0**	**0**	**0**	**0**

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 9,546,000

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	9,546,000	0	9,546,000	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	9,546,000	0	9,546,000	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 7,402,615,817

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,402,615,817 dan Rp7,215,281,629.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (4,508,603,541)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(4,508,603,541) dan Rp(4,092,855,419). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan

Koreksi yang menambah/ mengurangi : Rp. 0

Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan : Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	**0**

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi : Rp 0

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.6. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas : Rp. 4,013,176,771

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,013,176,771 dan Rp3,518,921,107. Untuk TA 2023 Transaksi Antar Entitas mengalami kenaikan sebesar Rp494,255,664 dibandingkan dengan TA 2022.

E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas : Rp. (495,426,770)

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(495,426,770) dan Rp(573,934,312).

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp78,507,542 dibandingkan dengan TA 2022.

E.8. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp 6,907,189,047

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,907,189,047 dan Rp6,641,347,317. Nilai Ekuitas Akhir di TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp265,841,730 dari Ekuitas Akhir TA 2022.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang dapat untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan Tahun 2023 Pengadilan Agama Bima sehingga tidak ada tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk laporan keuangan periode 30 Juni 2023 adalah:

1. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2023 BRI senilai Rp. 234,632,844,-
2. Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2023 BSI senilai Rp. 123,480,550,-
3. Belanja Barang berupa Penghasilan PPNPN Induk bulan Juni 2023 senilai Rp.28,113,000,-

F.2.3. Uang Muka dari KPPN senilai Rp. 0,-

Pada TA 2023 ini terdapat Saldo Kas sebesar Rp0 yang merupakan Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu yang tidak tercantum dalam TA 2022.

F.2.4. Rekening Operasional

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 307928, BPG 071 PA BIMA 01, Jenis Rekening Virtual Account Nomor 653243079281000, BANK RAKYAT INDONESIA CAB. BIMA dengan Nomor Persetujuan KPPN 000195/071 Tanggal 27 Mei 2021, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp.0.

F.2.5. Revisi DIPA

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2023 Pengadilan Agama Bima melakukan 4 (empat) kali Revisi DIPA, DIPA-005.01.2.307928/2023. Revisi pertama tanggal 5 Januari 2023, revisi kedua tanggal 8 Februari 2023, revisi ketiga tanggal 15 April 2023 Pemutakhiran POK dan Revisi Data Halaman III DIPA.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2023 tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2023 tidak terdapat catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

PENGADILAN AGAMA BIMA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN,
DAN NILAI BUKU ASET TETAP UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A.	**Tanah**		**3,538,955,000**	**0**	**3,538,955,000**
1.	Tanah Tempat Bangunan Kantor	40	623,668,000	0	623,668,000
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara	40	2,915,287,000	0	2,915,287,000
B.	**Peralatan dan Mesin**		**3,279,390,125**	**2,806,747,425**	**472,642,700**
1.	Station Wagon	5	487,000,003	487,000,003	0
2.	Sepeda Motor	7	141,130,400	141,130,400	0
3.	Scanner	5	15,361,669	15,361,669	0
4.	Lemari Besi/Metal	7	9,834,073	9,834,073	0
5.	Lemari Kayu	7	58,702,797	58,702,797	0
6.	Rak Besi	7	36,473,272	36,473,272	0
7.	Rak Kayu	7	22,799,996	22,799,996	0
8.	Filling Cabinet Besi	7	3,000,000	3,000,000	0
9.	Brandcash	7	12,110,660	12,110,660	0
10.	Bufet	8	9,548,000	9,548,000	0
11.	CCTV		20,000,000	20,000,000	0
12.	Mesin Absensi	5	25,544,667	25,544,667	0
13.	LCD Projecktor	5	29,599,998	29,599,998	0
14.	Layar LCD Projecktor	5	2,089,959	2,089,959	0
15.	Mesin Antrian	5	27,500,000	11,000,000	16,500,000
16.	Merja Kerja Kayu	8	101,406,590	101,406,590	0
17.	Kursi Besi/Metal	7	237,788,611	237,788,611	0
18.	Kursi Kayu	7	6,600,000	6,600,000	0
19.	Sice	5	45,774,995	45,774,995	0
20.	Bangku Panjang Besi/Metal	5	16,311,328	16,311,328	0
21.	Bangku Panjang Kayu	5	5,214,000	5,214,000	0

22.	Meja Rapat	5	13,806,000	13,806,000	0
23.	Meja Komputer	5	12,037,324	12,037,324	0
24.	Meja Resepsionis	5	13,525,800	13,525,800	0
25.	Lemari Es	5	1,500,000	1,500,000	0
26.	A.C. Split	5	154,100,000	154,100,000	0
27.	Televisi	5	43,624,000	30,124,000	13,500,000
28.	Tape Recorder	5	405,000	405,000	0
29.	Loudspeaker	5	32,000,000	12,800,000	19,200,000
30.	Wireless	5	1,700,000	1,700,000	0
31.	UPS	5	28,403,462	28,403,462	0
32.	Kamera	5	2,500,000	2,500,000	0
33.	Tiang Bendera	5	24,000	24,000	0
34.	Water Filter	5	84,000	84,000	0
35.	Dispenser	4	272,000	272,000	0
36.	Palu Sidang	5	24,000	24,000	0
37.	Lambang Instansi	5	3,769,920	3,769,920	0
38.	handyCam	5	10,000,000	10,000,000	0
39.	Asbak Tinggi	5	3,999,992	3,999,992	0
40.	Audio Mixing Portable	5	9,530,000	3,812,000	5,718,000
41.	UPS	5	23,131,000	21,103,800	2,027,200
42.	Microphone Cable	5	11,000,000	4,400,000	6,600,000
43.	Video Conference	5	50,000,000	20,000,000	30,000,000
44.	Telepon (PABX)	5	79,999,998	79,999,998	0
45.	Faxmail	5	570,000	570,000	0
46.	Genset	4	200,000,000	70,000,000	130,000,000
47.	Komputer Jaringan Lainnya	4	17,840,000	17,840,000	0
48.	P.C. Unit	5	608,085,237	439,857,737	168,227,500
49.	Laptop	5	363,160,324	318,190,324	44,970,000
50.	Monitor	5	26,510,000	26,510,000	0
51.	Printer (Peralatan Komputer PC)	5	48,365,460	42,240,460	6,125,000
52.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	39,700,000	9,925,000	29,775,000
53	Server	5	146,810,000	146,810,000	0
54.	Router	5	9,255,000	9,255,000	0
55.	Rak Server	4	9,866,590	9,866,590	0

C.	**Gedung dan Bangunan**		**3,901,639,000**	**722,834,589**	**3,178,804,411**
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50	3,618,059,000	581,526,107	3,036,532,893
2.	Gedung Pos Jaga Permanen	50	10,965,000	1,548,000	9,417,000
3.	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	50	118,509,000	118,509,000	0
4.	Rumah Negara Gol. II Tipe C Permanen	50	154,106,000	21,251,482	132,854,518
D.	**Jaringan**		**145,904,200**	47,061,799	98,842,401
1.	Jaringan Transmisi Teg. Diatas 300 KVA	20	125,500,000	32,268,754	93,231,246
2.	Jaringan dengan Media Udara Lainnya	20	20,404,200	14,793,045	5,611,155
E.	**Aset Tetap Lainnya**		**5,348,929**	**0**	**5,348,929**
1.	Monografi	5	1,267,209	0	1,267,209
2.	Buku Lainnya	5	4,081,720	0	4,081,720
F.	**Software**		**12,100,000**	**12,100,000**	**0**
1.	Software Komputer	1	12,100,000	12,100,000	0
	TOTAL		**10,871,237,254**	**3,576,643,813**	**7,294,593,441**

RABA - BIMA, 6 Juli 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

HUSNINAS,S.Ag.
NIP.196903132003121002

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

PENGADILAN AGAMA BIMA

KLAS IA

Jln. Gatot Subroto No.10 Raba Bima Telp. (0374) 43209 Fax. 45156

Web Site: http://pa-bima.go.id **e-mail** bima_pa@yahoo.co.id

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

BA	:	(005)	Mahkamah Agung
Eselon 1/UAPPA-E I	:	(01)	Badan Urusan Administrasi
UAPPA-W	:	(2300)	Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja/UAKPA	:	(307928)	Pengadilan Agama Bima

No.	Pendapatan/belanja	Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Realisasi Menurut Basis Akrual
			Tambah	Kurang	
A	Pendapatan Negara dan Hibah				
I	Penerimaan Perpajakan				
	1. Pajak Dalam negeri	0	0	0	0
	2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0
II	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
	2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	0	0	0	0
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,217,175	0	0	1,217,175
III	Penerimaan Hibah	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	1,217,175	0	0	1,217,175
B	Belanja Negara				
I	Belanja Pemerintah Pusat				
	1. Belanja Pegawai	3,237,135,471	358,113,394	0	3,595,248,865
	2. Belanja Barang	742,520,975	28,113,000	0	770,633,975
	3. Belanja Modal	0	0	0	0
	4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0	0	0	0
	5. Belanja Subsidi	0	0	0	0
	6. Belanja Hibah	0	0	0	0
	7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
	8. Belanja Lain-Lain	0	0	0	0
II	Transfer ke Daerah				
1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0

	b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0
	b. Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0
1	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian				
	a. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0
	b. Dana Penyesuaian	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara	3,979,656,446	386,226,394	0	4,365,882,840

RABA - BIMA, 5 Juli 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

HUSNINAS,S.Ag.
NIP.196903132003121002

PENGADILAN AGAMA BIMA KLAS IA
Jln. Gatot Subroto No.10 Raba Bima Telp. (0374) 43209 Fax. 45156
Web Site: http://pa-bima.go.id **e-mail** bima_pa@yahoo.co.id

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

BA	:	(005)	Mahkamah Agung
Eselon 1/UAPPA-E I	:	(01)	Badan Urusan Administrasi
UAPPA-W	:	(2300)	Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja/UAKPA	:	(307928)	Pengadilan Agama Bima

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi	Penyesuaian		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
			Menurut	Akrual (Rp)			
	Kode Akun	Uraian	Basis Kas	Tambah	Kurang		
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,550,913,400	190,325,200		1,741,238,600	Aplikasi GPP
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,951	2,266		22,217	Aplikasi GPP
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	113,239,980	13,406,910		126,646,890	Aplikasi GPP
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33,803,690	3,953,030		37,756,720	Aplikasi GPP
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,040,000	2,880,000		25,920,000	Aplikasi GPP
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,017,145,000	114,925,000		1,132,070,000	Aplikasi GPP
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	169,712,566	13,166,708		182,879,274	Aplikasi GPP
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80,168,940	9,704,280		89,873,220	Aplikasi GPP
9.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,385,000	1,650,000		15,035,000	Aplikasi GPP
10.	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	49,950,000	8,100,000		58,050,000	Aplikasi GPP
11.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	140,565,000	28,113,000		168,678,000	Penghasilan Induk PPNPN

RABA - BIMA, 6 Juli 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

HUSNINAS,S.Ag.
NIP.19690313200312100